

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang potensial bagi pembangunan negara. Peningkatan ekonomi yang baik juga turut berefek terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, pajak berperan dalam menyumbang penerimaan negara sebagai wujud kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Peran serta masyarakat untuk sadar dan peduli dalam membayar pajak adalah salah satu tolak ukur mengoptimalkan tujuan pajak (Nurrokhman, 2014).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang dengan tiada mendapat jasa timbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan di dalam pajak terdapat pajak pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pemberian nilai dari barang dan/atau jasa dalam daerah pabean di Indonesia. Pertumbuhan jenis pajak PPN yang mencapai 16,62%, menopang pertumbuhan penerimaan tahun 2017 dengan realisasi yang melampaui target yang ditetapkan (101,10%).

Tabel I.1 1

Realisasi Penerimaan PPN Tahun 2013 sampai 2017

Tahun	PPN Dalam Negeri	PPN Impor	Total	Persentase
2014	291.070,45	152.328,46	443.398,91	25,13%

2015	331.372,07	130.136,43	461.508,50	26,16%
2016	273.004,75	122.774,74	395.779,49	22,43%
2017	314.340,04	149.034,03	463.374,07	26,27%
Total			1.764.060,97	

Berdasarkan dari data diatas, realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan di tahun 2014 ke 2015 sebesar 1,03% itu karena penerimaan PPN Dalam Negeri masih dapat tumbuh dan membaik di Kuartal IV Tahun 2015 yang dipengaruhi oleh serangkaian Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang diluncurkan oleh Pemerintah dalam upayanya memperbaiki kondisi perekonomian di dalam negeri.

Tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan sebesar 3,73%. Hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan negatif jika dibandingkan tahun 2015, yang disebabkan antara lain oleh penurunan penerimaan dari setoran Masa (11,10%) sebagai dampak dari tingkat konsumsi yang rendah serta adanya perlambatan belanja pemerintah. Inflasi tahun 2016 sebesar 3,02% tergolong rendah dan berada di batas bawah sasaran target inflasi Bank Indonesia sebesar $4 \pm 1\%$. Rendahnya tingkat inflasi tersebut antara lain didorong oleh masih terbatasnya permintaan domestik.

Tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan 3,84% dikarenakan pertumbuhan ini didorong oleh kombinasi kondisi ekonomi secara umum yang masih positif dengan indikator pertumbuhan positif pada Sektor Industri Pengolahan (tumbuh 15,6%) dan Sektor Perdagangan Besar (tumbuh 15,4%) serta

aktivitas pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang tinggi dengan pertumbuhan pembayaran Wajib Pajak mencapai 39,1%. Pertumbuhan realisasi belanja barang dan modal yang mencapai hampir 15% juga menjadi faktor positif pendorong pertumbuhan PPN Dalam Negeri termasuk tingginya Dana Desa yang tercermin pada pertumbuhan PPN Dalam Negeri yang berasal dari Bendahara Dana Desa sebesar 125%. Dan dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai yang berasal dari ppn dalam negeri memiliki kontribusi yang cukup besar dalam Penerimaan Pajak Negera (sumber: www.pajak.go.id).

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak. Salah satu alasan pengusaha ingin mendaftar PKP karena pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dapat melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") atas barang atau jasanya kepada konsumen yang mengkonsumsi barang dan jasanya. Akan tetapi PPN wajib dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") di wilayah kerja pada masa akhir pajak tersebut.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak sekitar 700.000 pengusaha kena pajak yang terdaftar hanya 42% atau sekitar 290.000 yang melaporkan terkait surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai. Hestu Yoga Saksama, Kepala Sub-Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, menuturkan rata-rata setiap tahun jumlah pengusaha kena pajak (PKP) bertambah sekitar 10.000 - 20.000.

Dilansir dari bisnis.com kebangkrutan usaha merupakan salah satu penyebab tidak aktifnya PKP dalam menyampaikan SPT. PKP memiliki potensi dalam

perpindahan lokasi usaha, menjadi salah satu penyebab melesetnya pencapaian penerimaan PPN. Oleh karena itu, Ditjen Pajak tengah melakukan registrasi ulang seluruh PKP yang kini terdaftar agar proses pembinaan, pelayanan, dan pengawasan, serta uji kepatuhan wajib pajak lebih fokus dan akurat.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang *Self Assessment System* yang diwakili oleh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai telah melakukan beberapa kali penelitian di beberapa KPP. Nurrokhman (2014) meneliti tentang Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Hasil penelitian Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sadiq (2015) tentang Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Singosari Malang. Hasil penelitian membuktikan bahwa Jumlah PKP dan SPT Masa PPN berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan. Penelitian selanjutnya dilakukan juga oleh Lubis (2016) tentang Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Kota. Hasil penelitian menunjukkan Jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai sedangkan surat pemberitahuan masa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Aspek pajak yang termasuk mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 25 merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang akan meningkatkan penerimaan pajak.(Maulida, 2017)

Dilansir dari CNN Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, maraknya masyarakat yang doyan pamer harta kekayaan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak (WP). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengungkapan harta secara sukarela (*voluntary disclosure*) Setelah WP memamerkan kekayaannya, DJP bisa menggunakan itu sebagai basis informasi pemeriksaan jika hartanya tak dilaporkan secara lengkap di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. (CNN Indonesia,2017)

Penelitian-penelitian terdahulu tentang pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai telah melakukan beberapa kali penelitian di beberapa KPP. Trisnayanti (2015) dan Permatasari (2017) meneliti tentang pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama

Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Aspek lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah penagihan pajak. Penagihan pajak menurut UU No. 19 Tahun 2000 pasal 1 angka 9 merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Kegiatan ini perlu dilakukan karena diduga dapat membuat wajib pajak takut dan sadar sehingga wajib pajak akan membayar kewajiban perpajakannya (Maulida 2017). Adapun fenomena penerimaan pajak menurut Agus Martowardjo menteri keuangan mengakui kondisi krisis global mengakibatkan penurunan ini yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2012 tidak mencapai target (Martowardjo, 2013).

Penelitian-penelitian terdahulu tentang Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai telah melakukan beberapa kali penelitian di beberapa KPP. Trisnayanti (2015) dan Maulida (2017) meneliti tentang menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

Melihat berbagai fenomena dan jurnal yang sudah dipaparkan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lanjutan mengenai masalah PKP terdaftar, SPT Masa dan Penagihan Pajak. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang ada maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah PKP terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Pulogadung?
2. Apakah SPT Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Pulogadung?
3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Pulogadung?
4. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Pulogadung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk membuktikan pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Untuk membuktikan pengaruh surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
3. Untuk membuktikan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
4. Untuk membuktikan pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan bahan informasi di bidang perpajakan dan Terutama mengenai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika dikaitkan dengan teori Daya Pikul yaitu pengusaha kena pajak harus membayarkan pajaknya sesuai dengan daya pikulnya sendiri dan jika menurut teori Bakti yaitu pengusaha kena pajak harus berbakti kepada Negara dengan menaatin peraturan yang ada yaitu wajib membayarkan pajaknya. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini yang membahas pengaruh pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan masa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dan diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti sehubungan dengan jumlah pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan masa, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

b. Bagi instansi terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu

kebijakan dan pelaksanaan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai.

c. Bagi masyarakat

Sebagai tambahan wawasan tentang pentingnya pajak pertambahan nilai (PPN), sehingga diharapkan mampu bekerja sama dan memberikan kontribusi kepada negara untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai salah satu sumber terbesar pendapatan negara.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai tambahan dan masukan serta pemberian gambaran yang jelas kepada para peneliti yang ingin melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian yang telah peneliti lakukan.